

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia bisnis telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga banyak perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan peringkat terbaik dalam bidang industri yang berbeda. Perusahaan yang baik dapat dilihat dari kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan alat untuk mengukur baik atau buruknya suatu kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban tentang data keuangan serta kegiatan perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*). Selain itu laporan keuangan harus mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai informasi pembandingan karena laporan keuangan juga tidak hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan seperti karyawan, manajer dan direktur (Kasmir, 2016:6).

Laporan keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal suatu perusahaan seperti kreditur dan investor. Baik dari pihak internal maupun eksternal tentu saja mereka akan menilai, apakah kinerja perusahaan tersebut baik dalam suatu periode tertentu. Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan dengan cara menggunakan informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Sehingga seluruh *stakeholders* yang akan menggunakan informasi dalam laporan keuangan tentu saja harus memperhatikan isi yang memuat informasi yang dibutuhkan terutama dalam proses pengambilan keputusan (Ijudien, 2018).

Pengambilan keputusan suatu perusahaan juga bergantung pada informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Oleh karena itu, manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan akan memaksimalkan kinerja perusahaan dengan harapan dapat memenuhi keinginan para *stakeholders*. Dengan adanya laporan keuangan yang baik, maka tentu saja akan memudahkan seluruh pihak yang bersangkutan untuk

menggunakan informasi yang berhubungan untuk mengambil keputusan dalam suatu perusahaan (Suhendah, 2019).

Perusahaan cenderung membuat laporan keuangan menjadi terlihat baik kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) kepada perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan (Bayagub, dkk, 2018). Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat dapat mempengaruhi pelaku bisnis dalam berbagai aspek. Pada sisi lain, perusahaan juga dituntut untuk menyampaikan informasi berupa laporan keuangan yang akurat serta relevan. Namun, pada sisi lain mengakibatkan perusahaan harus memanipulasi laporan keuangan mereka. Terutama pada perusahaan mereka yang mengalami krisis keuangan (Damayanti dan Suryani, 2019). Banyak perusahaan yang melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang menyebabkan masalah bagi dari sisi sosial maupun ekonomi yang mengakibatkan kerugian terhadap berbagai pihak dalam perusahaan (Prajanto dan Pratiwi, 2016).

Manajer biasanya cenderung menutupi kondisi kinerja perusahaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan supaya terlihat kinerja keuangannya baik dalam periode tertentu dengan cara memanipulasi laporan keuangan perusahaan mereka. Tindakan manipulasi tersebut bisa dikatakan sebagai *fraud* atau kecurangan pada laporan keuangan karena informasi yang dimuat tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga akibat informasi yang dimuat tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, maka *stakeholders* tidak dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan tersebut yang tidak dapat diandalkan (Suhendah 2019).

Gejala *fraud* antara lain sebagai berikut yaitu perubahan gaya hidup seseorang yang semula hidup secara sederhana namun dalam waktu singkat dapat hidup secara mewah seperti dapat membeli kendaraan atau barang mewah lainnya, perubahan perilaku yang semula dikenal sebagai orang yang terbuka namun dalam beberapa waktu berubah menjadi orang yang tertutup, ataupun kecurigaan seseorang setelah melihat dua gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga dari gejala *fraud*

yang sudah disebutkan, maka dapat disebutkan sebagai *Red Flag* (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016). *Red Flag* merupakan suatu kondisi dimana terdapat kejanggalan atau adanya gejala yang akan menunjukkan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan (Rustiarini, dkk., 2016).

Menurut *survey* yang dilakukan *Association of Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2016, terdapat 3 jenis *fraud* sering terjadi di Indonesia antara lain Korupsi yang memiliki kasus dengan perolehan persentase sebesar 67%, lalu pada urutan kedua adalah penyalahgunaan aset dengan persentase 31%, dan yang terakhir adalah kasus kecurangan laporan keuangan dengan persentase sebesar 2%. Berdasarkan *survey fraud* di Indonesia tahun 2016 yang diadakan oleh ACFE dan diikuti oleh 229 responden. Dari 229 responden terdapat persebaran jawaban atas kuisisioner yang telah diberikan oleh ACFE antara lain sebagai berikut sebanyak 154 responden memilih untuk menjawab korupsi merupakan kasus *fraud* terbanyak yang terjadi Indonesia, lalu pada urutan kedua sebanyak 71 responden menjawab asset misappropriation atau penyalahgunaan aset adalah jenis *fraud* yang sering terjadi di Indonesia dengan urutan kedua, dan yang terakhir sebanyak 4 responden menjawab kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2016).

Berdasarkan hasil *survey* yang telah dilakukan oleh ACFE, informasi adanya korupsi dalam suatu perusahaan dapat diketahui karena adanya laporan yang telah diberikan oleh karyawan tersebut. Pernyataan tersebut telah didukung kuat dengan adanya *survey* yang telah dilakukan oleh laporan merupakan media yang paling banyak ditemukan untuk memperoleh informasi dengan persentase sebesar 37%, lalu diikuti dengan media lain yang turut berpartisipasi untuk memperoleh informasi antara lain sebagai berikut: Audit Eksternal sebesar 16,5%, Audit internal sebesar 13,5%, Pemeriksaan Dokumen sebesar 10,9%, Pengamatan dan Monitoring sebesar 4,3%, Rekonsiliasi dari akun-akun 3,9%, Pengukuhan Hukum sebesar 3,5%, Evaluasi manajemen sebesar 1,7%, Konsesi sebesar 0,9%, Bertepatan sebesar 0,9%, dan lainnya sebesar 7%. Media lainnya yang dimaksud pada *survey* ACFE ini adalah

berupa pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk mengungkapkan kebenaran atau *whistleblower* (ACFE, 2016).

Kecurangan pada perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan serta praktek kecurangan pada suatu laporan keuangan biasa disebut dengan *financial statement fraud*. Usaha tersebut biasa dilakukan perusahaan untuk menyiasati pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti investor, kreditor, dengan tujuan menyajikan laporan keuangan dengan nilai yang material (Bayagub, dkk, 2018; Sihombing dan Rahardjo, 2014). Disatu sisi karena adanya tuntutan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik, hal tersebut menjadi motivasi manajemen untuk melakukan *fraud* dengan cara memalsukan atau menyimpangkan laporan keuangan sehingga kinerja perusahaan akan selalu terlihat bagus dan sehat (Inayanti dan Sukirman, 2016).

Menurut ACFE pada *Report To The Nation* (RTTN) tahun 2018 menjelaskan bahwa yang paling banyak melakukan tindakan *fraud* adalah perusahaan baik itu perusahaan yang tertutup maupun perusahaan terbuka atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Go-Public*. Hal ini telah didukung kuat melalui survey yang dilaksanakan ACFE pada tahun 2018 yaitu sebesar 39% tindakan *fraud* dilakukan oleh perusahaan tertutup, lalu pada urutan kedua diduduki oleh perusahaan terbuka atau *Go-Public* dengan persentase sebesar 38%, lalu pada urutan ketiga diduduki oleh pihak pemerintah yang telah melakukan tindakan *fraud* dengan persentase sebesar 17%, pada urutan keempat diduduki oleh lembaga non profit seperti yayasan dengan persentase sebesar 4%, dan lain-lain dengan perolehan persentase 3%. Selain itu jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat fraud pada perusahaan dari bidang industri yang berbeda bisa dikatakan cukup material, penyebabnya adalah karena adanya perbedaan pendapatan dari sektor industri yang berbeda-beda (ACFE, 2018).

Data dari survey ACFE menjelaskan ada 8 sampel yang memiliki nilai kerugian yang cukup material akibat *fraud* pada wilayah asia pasifik yaitu pada bidang manufaktur terdapat 38 kasus dengan kerugian sebesar \$500.000, pada bidang perbankan dan jasa keuangan terdapat 25 kasus dengan kerugian rata-rata sebesar

\$310.000, lalu pada pemerintah dan administrasi publik terdapat 21 kasus dengan kerugian sebesar \$129.000, pada bidang layanan kesehatan terdapat 12 kasus dengan kerugian sebesar \$100.000, pada bidang pendidikan terdapat 12 kasus dengan kerugian sebesar \$236.000, bidang energi terdapat 12 kasus dengan kerugian sebesar \$286.000, bidang teknologi terdapat 11 kasus mengalami sebesar \$85.000, bidang asuransi dengan kerugian rata-rata sebesar \$105.000. Karena tingginya angka kerugian tentu saja terdapat motivasi yang kuat dari pihak perusahaan untuk melakukan tindakan *fraud* baik itu dari karyawan, manajer atau bahkan direktur suatu perusahaan (ACFE. 2018).

Contoh kasus yang mengakibatkan kerugian karena kecurangan laporan keuangan adalah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) yang terbukti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan mereka dan mengakibatkan kerugian pada 14 bank di Indonesia. Penurunan bisnis dari perusahaan induk Columbia tersebut merupakan motivasi utama untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dan pada saat itu auditor yang bertugas untuk mengaudit PT. SNP *Finance* adalah Deloitte. PT. SNP *Finance* pernah mendapatkan peringkat efek idA-/ *stable* yang berarti kondisi keuangan perusahaan sangat stabil dan tidak mengalami kendala. Bulan mei tahun 2018 Pefindo selaku pihak yang memberikan *rating* kredit terhadap PT. SNP *Finance* merubah peringkat perusahaan tersebut idCCC/ *credit watch negative* yang berarti kondisi perusahaan sedang tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang menguntungkan supaya perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Selisih waktu kurang dari satu bulan PT. SNP *Finance* mendapatkan peringkat idSD/ *selective default* yang berarti perusahaan telah gagal memenuhi kewajibannya yaitu membayar kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo. Akibat dari *rating* tersebut PT. SNP *Finance* mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp. 4,07 triliun yang terdiri dari kredit perbankan sebesar Rp. 2,22 triliun dan Surat Utang Jangka Menengah sebesar Rp. 1,85 triliun (Nurmayanti, 2018).

Pendeteksian *fraud* dalam dunia bisnis membutuhkan bantuan auditor untuk melakukan prosedur pendeteksian pada suatu laporan keuangan perusahaan. Menurut SAS 99, auditor bertugas untuk menjamin laporan keuangan pada klien mereka terhindar dari salah saji yang bernilai cukup materialitas, laporan keuangan tersebut jika terdapat salah saji yang material apakah disebabkan karena adanya kesalahan atau *fraud* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga auditor perlu melakukan prosedur analitis untuk memastikan apakah laporan keuangan suatu perusahaan bebas dari risiko *fraud* bernilai cukup material (AICPA, 2002).

Secara hukum, tindakan *fraud* juga termasuk salah satu tindakan yang melanggar hukum karena telah dianggap telah melakukan penipuan terhadap pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Ada tiga landasan hukum yang memuat tentang *fraud* dan berlaku di Indonesia yaitu (Pasal 263 dan 264 KUHP) tentang adanya kesengajaan melakukan perbuatan jahat dengan melakukan pemalsuan dokumen seperti laporan keuangan perusahaan, Melakukan tindak kecurangan atau *fraud* dengan cara melakukan penipuan dan kebohongan yang telah diatur dalam (Pasal 378 KUHP), terakhir adanya indikasi kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di Indonesia telah dimuat dalam (Pasal 55 dan 56 KUHP). Sehingga dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa laporan keuangan membutuhkan sifat transparan. Demi penyajian dan pengungkapan informasi yang sebenarnya (Wirawan, 2017).

Penelitian terhadulu yang dilakukan oleh Cressey (1953) menyatakan bahwa *fraudulent financial report* dapat terjadi karena adanya tiga faktor penyebab adalah tekanan dalam perusahaan, peluang, dan rasionalisasi. Dari ketiga faktor penyebab tersebut, dikenal sebagai segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*). Pada faktor *fraud* tekanan dapat terjadi ketika perusahaan dalam kondisi kinerja perusahaan berada dalam titik dimana mereka tidak mampu untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Karena tekanan dari perusahaan menjadi alasan yang kuat pihak manajemen melakukan *fraud* pada laporan keuangan dengan tujuan menutupi kinerja yang buruk. (Arifin, dkk., 2016; Skousen *et al.*, 2009).

Faktor *fraud* berikutnya adalah adanya kesempatan dimana pelaku melihat adanya celah atau kelemahan dari pengendalian internal perusahaan, sehingga mereka dapat melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh pihak manapun. Selain itu, kesalahan yang cukup fatal dari perusahaan adalah tidak adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internal. Sehingga, ketika para pelaku kecurangan mengetahui bahwa perusahaan tempat dimana mereka bekerja belum melakukan perbaikan. Maka, peluang mereka untuk melakukan *fraud* dan tidak ketahuan akan menjadi besar. Faktor kecurangan yang terakhir adalah rasionalisasi dimana perusahaan melakukan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang telah dilakukan. Biasanya pelaku kecurangan berusaha untuk mencari alasan yang cukup rasional sebagai pembelaan terhadap tindakan yang telah mereka lakukan (Arifin, dkk., 2016; Sukirman dan Maylia, 2013).

Wolfe dan Hermason (2004) telah melakukan pengembangan terhadap penelitian *fraud triangle* yang dikemukakan pertama kali oleh Cressey (1953). Pengembangan terhadap penelitian terdahulu *fraud triangle* berhasil mengembangkan penyebab terjadinya kecurangan yaitu *capability* yang merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi. Selain itu terdapat enam elemen yang sangat penting untuk membentuk *capability* yaitu *Positioning* yang merupakan pengaruh posisi atau jabatan seseorang dalam perusahaan yang dapat memberikan pengaruh untuk menggunakan peluang yang ada untuk melakukan *fraud*. Kedua, *Intelligence and Creativity* dimana pelaku *fraud* benar-benar memahami situasi yang ada serta menemukan titik kelemahan pada pengendalian internal suatu perusahaan dan mereka menggunakan jabatan serta kewenangan mereka untuk melakukan *fraud*.

Ketiga, *Convidence* atau Ego merupakan dimana pelaku kecurangan harus mempunyai sifat ego beserta keyakinan yang kuat dalam dirinya bahwa mereka tidak akan ketahuan ketika melakukan kecurangan atau *fraud*. Keempat, *Coercion* dimana pelaku *fraud* memaksa pihak lain baik yang bersangkutan atau tidak dengan tujuan mengelabui bahwa mereka telah melakukan tindakan kecurangan. Kelima, *Deceit* merupakan tindakan *fraud* yang dilakukan secara konsisten. Biasanya, pelaku

kecurangan melakukannya dengan penuh keyakinan dan mereka harus mampu menyusun narasi sesuai dengan fakta yang telah mereka susun sendiri dengan tujuan tindakan mereka tidak dapat terdeteksi oleh pihak manapun. Terakhir adalah *Stress* seseorang yang biasa melakukan *fraud* harus mampu mengendalikan stress yang ada dalam diri sendiri. Seseorang yang terbiasa melakukan *fraud* maka tentu saja akan meminimalkan tekanan serta timbulnya perasaan tidak tenang dalam diri mereka supaya menjaga tindakan kecurangan mereka tetap tidak diketahui oleh pihak manapun dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan baik secara individu maupun pada perusahaan (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Stabilitas keuangan merupakan kondisi ekonomi dimana kegiatan pengalokasian dana, penetapan harga serta pengelolaan risiko dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan adalah mereka yang mampu menunjukkan kondisi kinerja perusahaan tersebut. Namun, jika mereka tidak dapat memenuhi tujuan tersebut maka tentu saja perusahaan akan mengalami ketidakstabilan keuangan. Penyebab terjadinya ketidakstabilan keuangan bisa saja karena kondisi politik suatu negara, adanya persaingan industri yang cukup ketat, perubahan kurs atau mata uang asing, perkembangan teknologi dan informatika serta adanya penurunan kinerja perusahaan (Suhendah, 2019).

Kinerja perusahaan tersebut bisa saja menurun karena adanya masalah pendanaan. Seperti *leverage* yang merupakan bagaimana perusahaan mengelola dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang didapatkan dari pihak eksternal perusahaan yaitu kreditur. Semakin tinggi angka *leverage* dalam perusahaan maka mencerminkan juga semakin tingginya risiko kredit yang dimiliki perusahaan (Puspaningsih dan Sabella, 2017). Selain itu juga terdapat likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek (Listyawati, 2016). Likuiditas juga merupakan tolak ukur kinerja perusahaan, karena semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi juga risiko yang dimiliki perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo Sehingga, karena tingginya rasio likuiditas perusahaan akan bertambah

juga tekanan yang didapatkan oleh manajemen untuk segera melunasi utang mereka. Berarti yang menyebabkan pemicu terjadinya *financial statement fraud* karena adanya tekanan kepada manajemen untuk segera melunasi utang perusahaan (Arifin, dkk. 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah stabilitas keuangan, *leverage* serta likuiditas dapat mempengaruhi *financial statement fraud* perusahaan. Menurut Wimardana dan Nurbaiti (2018) mengatakan bahwa stabilitas keuangan memiliki pengaruh pada kecurangan pelaporan keuangan. Alasannya karena ketika perusahaan mengalami kondisi stabilitas keuangan yang tidak baik, maka pihak manajemen akan melakukan segala cara untuk memperlihatkan stabilitas keuangan perusahaan tetap terlihat baik terutama saat dilihat oleh investor. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayagub, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Penyebabnya adalah karena dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan, sehingga walaupun pihak manajemen menghadapi tekanan serta kondisi perekonomian yang kurang stabil maka kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Riset terdahulu yang dilakukan Arifin, dkk. (2016) dan Listyawati (2016) menyimpulkan rasio *leverage* memiliki pengaruh terhadap *financial statement fraud*. Alasannya, karena perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan cenderung mengalami probabilitas kecurangan pelaporan keuangan yang tinggi. Hutang yang tinggi pada perusahaan akan memotivasi pihak manajemen melakukan kecurangan supaya hutang perusahaan terlihat sedikit demi menarik perhatian investor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendah (2019), Abriyani dan Aldilla (2017) dan Arifin, dkk. (2016) yang mengatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Penyebabnya adalah kreditur akan mengawasi secara ketat terhadap perusahaan yang

akan meminjam dana pada mereka sehingga sangat sulit bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan.

Variabel likuiditas juga terdapat perbedaaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk. (2016) dan Suhendah (2019) menyimpulkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Alasannya perusahaan masih mempunyai aset dianggap mampu untuk melunasi kewajiban mereka dalam jangka waktu pendek. Biasanya manajemen lebih suka memanipulasi aset yang bersifat likuid seperti kas karena perusahaan membayar kewajiban jangka panjang dengan aset mereka berupa kas atau setara kas. Riset terdahulu Prajanto dan Pratiwi (2016) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh pada *financial statement fraud*. Hasil penelitian tersebut positif karena adanya pengaruh yang tinggi antara likuiditas terhadap *financial statement fraud*. Penyebabnya adalah karena adanya celah bagi pihak manajemen untuk memanipulasi tingkat likuiditas perusahaan demi menarik perhatian investor untuk menginvestasikan modal ketika perusahaan mengalami krisis keuangan.

Ketiga variabel yang telah dipilih tentu saja masih menimbulkan pertanyaan apakah ketiga variabel tersebut masih memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap *financial statement fraud*. Selain itu, objek penelitian adalah perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang dipilih adalah tahun 2016-2018 dengan alasan supaya memberikan hasil penelitian yang lebih relevan. Apakah stabilitas keuangan, *leverage*, dan likuiditas berpengaruh terhadap *financial statement fraud* pada periode 2016-2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan beserta dengan penjelasan diberikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah pengaruh stabilitas keuangan, *leverage*, likuiditas berpengaruh terhadap *financial statement fraud* periode 2016-2018?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan penelitian terdahulu apakah stabilitas keuangan, *leverage*, dan likuiditas berpengaruh terhadap *financial statement fraud* periode 2016-2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat akademis:

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para pihak akademis tentang manfaat pengaruh *leverage*, likuiditas, rasio profitabilitas terhadap *financial statement fraud*, serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan pihak akademis yang ingin melakukan pengembangan penelitian.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi auditor dalam mendeteksi gejala *fraud* yang terjadi pada klien mereka. Melalui stabilitas keuangan, rasio *leverage*, rasio likuiditas. Sehingga, dapat membantu auditor untuk mengeluarkan opini audit secara tepat dan akurat. Dengan harapan auditor dapat meminimalkan kesalahan akibat informasi yang diberikan klien mereka kurang relevan dan transparan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan evaluasi para *stakeholders* untuk mendeteksi gejala *fraud* melalui stabilitas keuangan, rasio *leverage*, rasio likuiditas dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan membantu *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) supaya dapat menjadi acuan terhadap survey pendeteksian *fraud* yang dapat membantu banyak negara dari berbagai belahan dunia. Dengan harapan mampu menekan angka kasus *fraud* khususnya dibidang laporan keuangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini tersusun atas lima bab. Uraian pokok penelitian yang dijabarkan dalam setiap bab antara lain sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini terdiri dari lima pokok pembahasan yaitu latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 berisi tentang penjelasan dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penjelasan dan pengembangan hipotesis serta model analisis penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang dipilih terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengumpulan sampel serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 berisi tentang cara menjabarkan serta mendeskripsikan tentang karakteristik dari objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan penelitian.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 berisikan simpulan pada hasil analisis, keterbatasan serta saran untuk penelitian berikutnya.